



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA PANTAI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Erpida

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : Erpida@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted in Pantai Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi District. The formulation of the problem in this study is how is the Empowerment and Family Welfare Program (PKK) in the welfare of the people in Pantai Village, Kuantan Mudik District. The purpose of this research is to find out and analyze the Empowerment and Family Welfare Program (PKK) for the welfare of the people in the coastal village of Kuantan Mudik sub-district. The research approach used in this study is a survey research method with a descriptive level and uses quantitative analysis with a sampling technique for PKK elements, namely the Saturated Sampling Technique when all members of the population are used as samples and for community elements using Simple Random Sampling is taking sample members from the population done randomly without showing the existing strata in the population. In collecting data, using primary data and secondary data which is done by means of observation, questionnaires, and documentation. The research location is in Pantai Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. From this study where the population and sample of this study were PKK elements and community elements in Pantai Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency, as many as 58 people.

Then the results of this study are the Empowerment and Family Welfare Program (PKK) in Welfare of the people in Pantai Village, Kuantan Mudik District, Less Implemented

Keywords: Empowerment

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mensejahterakan masyarakat Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mensejahterakan masyarakat di desa pantai kecamatan kuantan mudik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey dengan tingkatan deskriptif dan menggunakan Analisis kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel untuk unsur PKK yaitu Teknik Sampling Jenuh apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan untuk unsur masyarakat menggunakan Simple Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperlihatkan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam pengambilan data, menggunakan data primer dan data sekunder



yang dilakukan dengan cara Observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Lokasi penelitian yaitu di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Dari penelitian ini dimana Populasi dan Sampel penelitian ini yaitu unsur PKK dan unsur masyarakat Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 58 orang. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mensejahterakan masyarakat Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kurang Terlaksana.

Kata Kunci: Pemberdayaan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan Sosial wujud dari upaya terpenuhinya segala aspek oleh individu atau kelompok profesional sehingga tercapainya hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat berfungsi secara sosial sebagai wujud tanggung jawab pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dan ketahanan sosial masyarakat, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat serta tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara melembaga dan berkelanjutan dalam wujud manajemen berkualitas terpadu, terbuka, bermitra, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan berkelanjutan.

Kesejahteraan sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin.

Kesejahteraan hak setiap warga Negara, dari awal kemerdekaan Indonesia sehingga sekarang kesejahteraan paling menarik perhatian karena pada kenyataannya kesejahteraan hanyalah argument belaka. Kesejahteraan dilihat dari berbagai aspek kehidupan, kesejahteraan tidak luput dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita diantaranya: kekerasan perempuan dan anak, kematian ibu dan anak, kekerasan seksual, kesenjangan gender dan diskriminasi sosial.

Salah satu unsur penting dalam masyarakat yang dapat memasyarakatkan berbagai kegiatan pembangunan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). LPMD cenderung dituntut perannya secara optimal dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai pedoman



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota mengenai pedoman umum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dari sinilah terbentuknya Tim Penggerak PKK.

PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan, memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan.

Tujuan PKK adalah memberdayakan perempuan untuk turut berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraan demi terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera dan lahir batin.

Menurut Tim Penggerak PKK Pusat (2010) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) memiliki 10 program kerja pokok yakni :

1. Penghayatan dan pengamalan pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan laksanakan rumah tangga
6. Pendidikan dan Keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

PKK yang ada di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peran dalam hal lingkungan dan memberdayakan partisipasi perempuan, seperti penyuluhan dan pelatihan bagi kader PKK, pengajian, gotong-royong, keterampilan, posyandu, lansia dan batita, taman PKK dan Paud. Penyuluhan dan pelatihan Kader PKK biasanya di isi oleh pemateri dari Pusat (Pemerintahan) misalnya penyuluhan tentang kesehatan pemateri biasanya adalah dokter yang ada di Puskesmas dan ada beberapa penyuluhan lainnya, posyandu lansia dan balita juga bekerja sama dengan dokter, perawat dan bidan yang ada di Puskesmas, untuk kegiatan Paud sendiri di laksanakan setiap hari di kantor PKK yang ada di Desa Pantai.

Program PKK ini dilakukan agar perempuan dapat memaksimalkan kinerja, memberikan dampak positif bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kesejahteraan membina keluarga sehat. Tapi sangat di sayangkan hal ini tidak diketahui oleh banyak orang.



Kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Pantai jika dilihat dari sudut pandang masyarakat dapat di kategorikan Kurang baik diantaranya, kurangnya kerjasama gotong-royong membersihkan lingkungan setempat dan menjaga keamanan lingkungan.

Jika dilihat dari sudut pandang sikap remajanya masih banyak yang harus di perbaiki mengingat masa remaja yang merupakan proses transisi dari anak-anak ke dewasa hal ini mendapat perhatian khusus dari masyarakat, maka dari itu program penyuluhan PKK harus terus dilaksanakan demi meminimalisir kenakalan remaja, pernikahan dini, diskriminasi gender dan meningkatkan peran perempuan agar berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mensejahterakan Masyarakat Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang peraranan tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik.

1.4.2. Secara Praktis

Bagi instansi yang terkait diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka membuat rencana kerja (program) dan bahan masukan dalam membuat kajian program kesejahteraan sosial berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Teori Administrasi Negara

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Ridwan, 2011 : 29) mengartikan administrasi Negara sebagai Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.



Menurut Waldo (dalam Syafiie, 2010 : 24) Administrasi Negara adalah manajemen dari organisasi manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Georgio J. Gordon (dalam Syafiie, 2016 : 33) Administrasi Negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

Menurut Edward H. Litchfield (dalam Afifuddin, 2012 : 24) mengatakan bahwa administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam, badan-badan pemerintah diorganisasi dilengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Goerge J. Gordon (dalam Afifuddin, 2012 : 24) administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2010 : 14) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafiie, 2010 : 14) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hadart Nawawi (dalam Syafiie, 2010 : 14) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sondang P Siagian (dalam Wirman Safri, 2012 : 9) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut White (dalam Wirman Safri, 2012 : 9) Administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil.

Administrasi dapat dibedakan menjadi dua yakni, administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah suatu bentuk proses usaha yang dimulai menciptakan instrumen pengaturan kemudian digunakan untuk melahirkan keteraturan dalam melaksanakan kegiatan pada manusia kelompok tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Aristoteles (dalam Syafiie, 2010 : 20) Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.



Menurut Jaen Bodin (dalam Syafiie, 2010 : 20) Negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kausa yang berdaulat.

Menurut Sumantri (dalam Syafiie, 2010 : 20) Negara adalah suatu organisasi kekuasaan oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama Negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.

Menurut Djokosoetono (dalam Syafiie, 2010 : 20) Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada dibawah suatu pemerintah yang sama.

Menurut Afifuddin (dalam Gettel, 2015 : 8) Negara adalah komunitas oknum-oknum, secara permanen mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintahan, dengan menciptakan dan menjalankan hukum secara menyeluruh dalam lingkungan.

Menurut H. Makmur & Rohana Tthahier (2017 : 62) Negara merupakan tempat menggantungkan harapan bagi setiap anggota masyarakat agar dapat menggunakan kekuasaan dan kewenangannya. Sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan sehingga setiap anggota masyarakat terjamin melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari

Menurut Aristoteles (dalam Syafiie, 2010 : 22) Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya

Menurut Edward H.Litchfield (dalam Syafiie, 2016 : 32) Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam – macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga- tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Geral E. Caiden (dalam Syafiie, 2016 : 33) mengemukakan dalam bukunya *Publik Administration* memberikan patokan bahwa untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut termasuk pemerintah adalah dengan melihat tiga hal, yaitu organisasinya dibentuk dengan peraturan penerintah, karyawannya disebut pegawai negeri, dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat.

Administrasi dalam arti sempit, yaitu administrasi berasal dari kata *administratie*, yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan, meliputi kegiatan mencatat, menerima, menghimpun, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan.

Administrasi dalam arti luas, yaitu administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan tertentu, kelompok orang yang bekerja sama memerlukan seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai.

2.1.2. Teori Organisasi



Menurut Jhon D. Millet (dalam Syafiie, 2010 : 51) Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Menurut Amirullah Haris Budiono (dalam Karyoto, 2016 : 30) organisasi adalah pengelolaan orang-orang yang dilakukan secara sengaja untuk mewujudkan tujuan tertentu. Pengaturan para pekerja dimaksudkan agar mereka dapat mengetahui posisi, tugas, dan tanggung jawabnya terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan guna mewujudkan tujuan organisasi.

Menurut S.P. Hasibuan (dalam Karyoto, 2016 : 30) menyimpulkan bahwa organisasi adalah kumpulan yang formal dan berstruktur dari orang-orang yang bekerja sama melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pekerjaan organisasi ini bersifat kompleks sehingga harus dilakukan secara berkelompok atau secara bersama-sama.

Menurut M. Manullang (dalam Karyoto, 2016 : 30) menyimpulkan bahwa organisasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang secara bersama-sama melakukan suatu kegiatan guna mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Organisasi adalah suatu perkumpulan orang-orang. Artinya, organisasi hanya bias dibangun jika ada dua orang atau lebih.

Menurut Robbins (dalam Edison dkk, 2016 : 49) organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donelly (dalam Edison dkk 2016 : 49) organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko (dalam Edison dkk 2016 : 54) walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama (tetapi karena tujuan dan strategi organisasi yang berbeda), hal ini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda.

Menurut Khalil (dalam Edison dkk, 2016 : 49) organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan.

Menurut Hasibuan (2017 : 5) organisasi adalah sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Stoner (dalam Mulyadi, 2015 : 6) organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui nama orang-orang di bawah pengarah pimpinan mengejar tujuan bersama. Sedangkan menurut Adam Wijaya (dalam Mulyadi, 2015 : 11) perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap manusia.

Ulber Silalahi (2011 : 406) organisasi adalah satu alat atau sarana yang digunakan oleh orang untuk mengkoordinasi tindakan-tindakan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.



Menurut Usman Effendi (2014 : 130) organisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu organisasi formal dan informal. Organisasi formal adalah suatu sistem mengenai aktivitas- aktivitas yang berkoordinasikan dari sekelompok orang yang berkerjasama kearah suatu tujuan bersama. Sedangkan organisasi informal adalah kumpulan hubungan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari meskipun pada akhirnya hubungan- hubungan tak disadari untuk tujuan bersama.

2.1.3. Teori Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk dan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak kesatuan tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang me miliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormatin dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai urusan penyelenggara Pemerintahan Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Widjaja (2014 : 3) Menjelaskan Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi,otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut sutardjo kartohsrdikusumo (luthfia,2013) desa merupakan kesatuan hukum dimana masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan desa, penduduk memiliki lembaga-lembaga dan peraturan yang ditetapkan dan dibentuk sendiri oleh masyarakat desa. Desa merupakan suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat di desa. Secara umum desa bertempat pada lokasi yang jauh dari kota atau di luar kota dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Paul h. Landis (muin dan rully,2016) mendefinisikan desa dalam 3 definisi yaitu desa sebagai lingkungan yang memiliki penduduk kurang dari 2500 jiwa, sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama, sebagai suatu



lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian. Sedangkan r. Bintaro (soleh, 2017) mendefinisikan desa sebagai perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

2.1.4. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia berperan penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Mathis dan Jackson (2012: 5) manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan.

Masram (2017: 2) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam Suparyadi (2015 :3) dijelaskan manajemen sumberdaya manusia memainkan peranan yang menentukan dalam kehidupan organisasi, yaitu seberapa baik strategi organisasi dapat dilaksanakan, dan seberapa jauh tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam praktik manajemen sumberdaya manusia, yaitu :

1. Karyawan sebagai unsur investasi perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik agar memiliki kinerja yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi jangka panjang kedalam organisasi, yaitu tercapainya sasaran-sasaran organisasi.
2. Kebijakan dan program organisasi harus di arahkan untuk mencapai tujuan kedua pihak (organisasi dan karyawan), sehingga dapat memuaskan, baik bagi organisasi maupun bagi karyawan.
3. Kebijakan dan program organisasi harus memberikan peluang yang besar bagi karyawan untuk memngembangkan diri guna mencapai cita-citanya.
4. Dalam melaksanakan manajemen sumberdaya manusia, kebijakan organisasi tidak boleh bersifat diskriminatif.
5. Pelaksanaan program organisasi hendaknya memberi ruang yang luas bagi karyawan untuk berpartisipasi, sehingga mereka mampu mengeksperesikan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal.
6. Penilaian kinerja karyawan harus dilakukan dengan tolak ukur yang objektif dan bersifat spesifik, dilaksanakan secara jujur dan adil, serta dilaksanakan nya umpan balik dua arah.
7. Pemberian kompensasi hendaknya dilakukan secara adil, yaitu didasarkan pada factor-faktor kompensabel dari masing-masing jabatan atau pekerjaan.
8. Penegakan disiplin kepegawaian hendaknya dilaksanakan secara progresif, kecuali terhadap karyawan yang melakukan suatu pelanggaran dengan ancaman hukuman pidana penjara dalam waktu tertentu.

2.1.5. Teori Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 pasal 1 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan Keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan wadah yang menggali dan mengerakkan partisipasi masyarakat khususnya dalam lingkungan keluarga, ini berarti wadah yang menampung serta melaksanakan aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam usaha menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) sebagai mekanisme dan gerakan yang telah berkembang di desa-desa di seluruh pelosok tanah air, telah menunjukkan keberhasilannya dengan perempuan sebagai peran utamanya. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangun masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun mengerahkan dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010 : 23).

Dengan adanya kegiatan PKK diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan keluarga pada umumnya yang berpedoman pada pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK. Selain memiliki program-program pokok, PKK juga memiliki panca dharma PKK. Isi dari panca dharma ini tentang peranan-peranan perempuan dalam kehidupan (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010 : 25), yaitu sebagai berikut:

1. Wanita sebagai pendamping suami
2. Wanita sebagai pengelola rumah tangga
3. Wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak
4. Wanita sebagai pencari nafkah tambahan
5. Wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat

Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor: 14/KEP/PKK Pst/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015 Tentang Hasil Rakernas VIII Bidang Rencana Kerja 5 Tahun PKK Tahun 2015-2020. Sepuluh program pokok PKK yaitu: penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, papan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat.

Pada dasarnya strategi pemberdayaan adalah cara dalam melaksanakan proses pemberdayaan, strategi-strategi menurut Suharto memiliki tujuan akhir adanya kemandirian. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu pemungkinan, perlindungan, penyokong, dan pemeliharaan (Suharto, 2005 : 63) :

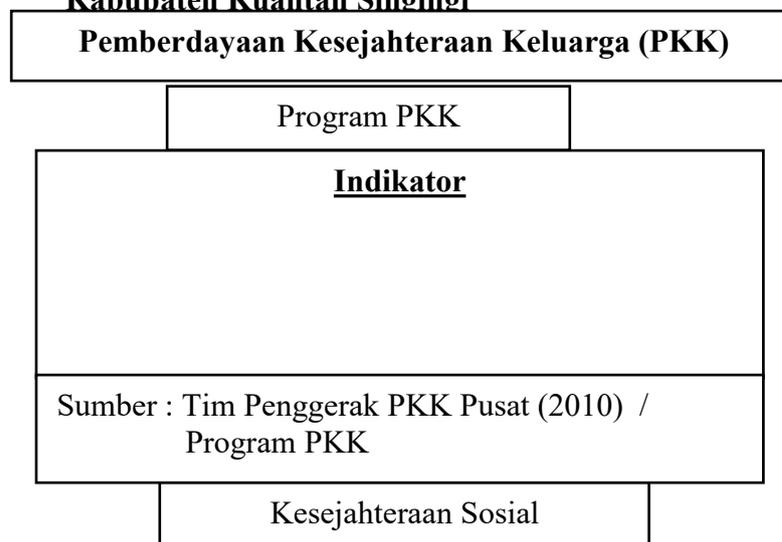
1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus

mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.

2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak terlindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan atau pendukung, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis lebih merujuk pada teori pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suharto.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1: Kerangka Analisis Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Penelitian 2023

2.3. Hipotesis Kerja

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang penulis simpulkan berdasarkan observasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Diduga Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Mensejahterakan masyarakat



Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang Terlaksana dengan baik.

2.4. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan analisis data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa ini, maka penulis perlu membuat Konsep Operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulisan diantaranya dengan berpedoman ke program PKK yang tidak berjalan berpedoman ke sumber Tim Penggerak PKK Pusat (2010):

- 2.4.1. Dalam hal ini PKK harus melaksanakan demonstrasi mengenai gizi, kesehatan, keluarga berencana bahkan pemberian makanan tambahan dan lain sebagainya.
- 2.4.2. Upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan alam, agar tercipta sebuah sistem yang berkelanjutan.
- 2.4.3. Perencanaan sehat digunakan dalam keluarga sejahtera dengan harapan

2.5. Operasional Variabel

Tabel II.1: Operasional Variabel Penelitian Analisis Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Pemberda yaan	Tim Penggerak PKK Pusat (2010) Program PKK	1. Kesehatan	a. Memantapkan Keluarga Sadar Gizi	Ordinal
			b. PMT bagi balita, lansia di posyandu	Ordinal
		2. Kelestarian Lingkungan Hidup	a. Menanamkan kesadaran tentang kebersihan	Ordinal
			b. Pengembangan kualitas lingkungan dan pemukiman	Ordinal
		3. Perencanaan Sehat	a. Pemahaman dan kesertaan dalam program KB	Ordinal
			b. Perencanaan Menabung	Ordinal

Sumber: Modifikasi Olahan, 2023

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan tingkatan deskriptif dan menggunakan analisis kuantitatif.



Menurut Neuman W Lawrence (dalam Sugiyono, 2017 : 32) penelitian survey adalah penelitian yang menanyakan ke beberapa orang yang disebut responden tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang.

Menurut Arikundo (2010 : 282) Kuantitatif yaitu membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan teori-teori yang ada hubungan dengan permasalahan guna menarik suatu kesimpulan dan ditabulasikan dalam bentuk tabel-tabel frekuensi.

Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut V. Wiratna Sujarweni, (2019 : 73) Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah Masyarakat dan Unsur PKK di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut V. Wiratna Sujarweni, (2019 : 73) Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan hasil sebagainya.

Lokasi penelitian

Alamat Kantor Desa yaitu jalan Kapten Fadillah Km. No 20 Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Observasi

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2018 : 145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Kuesioner

Sugiyono (2018 : 142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Dokumentasi

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2019 : 31) dokumentasi merupakan metode pengumpulan data sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan



yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Metode Analisis Data

Semua data yang sudah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagaibahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini (Sugiyono 2015). Analisis ini dilakukan dengan menghitung jumlah hasil perkalian frekuensi dengan skor $\sum(F.X)$ dibagi dengan jumlah jawaban responden, Adapun rumus yang digunakan untuk menganalisis tabel ini yaitu:

$$X = \frac{\sum(F.X)}{N}$$

Keterangan :

F = Frekuensi

X = Rata-Rata

$\sum(F.X)$ = Jumlah Skor Ketagori Jawaban

N = Jumlah Responden

$$\text{Rata-rata skor} = \frac{\text{Jumlah Skor Ketagori Jawaban}}{\text{Jumlah Responden}}$$

Analisis data juga

menggunakan skala Likert untuk memudahkan analisa pernyataan yang diajukan kepada responden. Pemberian skor dimulai dari nilai tertinggi dengan skor 5 dan skor terendah 1 Sugiyono (2015 :165).

Sangat terlaksana	Skor 5
Terlaksana	Skor 4
Cukup terlaksana	Skor 3
Kurang terlaksana	Skor 2
Tidak terlaksana	Skor 1

Selanjutnya untuk mengukur bagaimana Program PKK maka dibagi menjadi 5 ketagori yaitu :

1. Sangat terlaksana : 4,20 – 5,00
2. Terlaksana : 3,40 – 4,19
3. Cukup terlaksana : 2,60 -3,39
4. Kurang terlaksana : 1,80 – 2,59
5. Tidak terlaksana : 1,00 – 1,79

4. Hasil Penelitian

Indikator Kesehatan

Dari hasil sebaran kuesioner Maka didapat Jumlah Rata-rata Skor 1,86 termasuk pada ketagori Kurang Terlaksana yang berada pada skala 1,80-2,59 , Dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kesehatan seperti



pemberdayaan keluarga dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, gerakan sayang ibu, mobil ambulan kelurahan, disiplin imunisasi, upaya perbaikan gizi, gizi seimbang pada ibu hamil dan ibu menyusui, usaha kesehatan sekolah, upaya kecukupan nutrisi (protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air), pemberian air susu ibu dan posyandu dalam Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah masi Kurang Terlaksana.

Indikator Kelestarian Lingkungan Hidup

Dari hasil sebaran kuesioner Maka didapat Jumlah Rata-rata Skor 1,91, termasuk pada ketagori Kurang Terlaksana yang berada pada skala 1,80-2,59 , Dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indicator Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kurang Terlaksana

Indikator Perencanaan Sehat

Dari hasil sebaran kuesioner Maka didapat Jumlah Rata-rata Skor 2,49, termasuk pada ketagori Kurang Terlaksana, yang berada pada skala 1,80-2,59. Dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Perencanaan Sehat dalam Program PKK di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kurang Terlaksana

5. SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian Jadi hasil dari Observasi, Quesioner, dan Dokumentasi Analisis Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh Rata-rata Skor 2. Jika dilihat dari ketagori tingkat pengukuran berarti tergolong Kurang Terlaksana karena berada pada peringkat 4 yaitu 1,80-2,59.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Ayah dan Ibunda yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Bapak Dr.H.Nopriadi,S.K.M Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang menjadi motivator untuk bisa menjadi orang besar, Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

menyelesaikan penelitian, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Effendi Usman. 2014. *Asas Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Karyoto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen Teori, Defenisi dan Konsep*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Poulus, Sugiono, dan Rusdin. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Pendekatan Teori dan Praktis*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Suparyadi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kediri, CV.ANDI OFFSET.
- Suwatno, dan Donni Juni Priansa. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Sutardjo Kartohrsdikusumo. 2013 *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan*
- Suwatno, dan Priansa, D. 2011. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Public Dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. PT. RINEKA CIPTA.
- Syafiie, Inu Kencana, 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama..
- Widjaja, 2014. *Otonomi Desa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Penggerak PKK. 2010. *Buku Pegangan Kader Pengelola/Penyuluh Lapangan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan*. Jakarta.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

B. Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa